

IMPLEMENTASI SUPERVISI DI BALAI BESAR GURU PENGGERAK (BBGP) JAWA BARAT DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

Ricky Yoseptry^{1*}, Agus Wahyu², Hari Suprayoga³, Nur Indah Juniati⁴, Siti
Fatimah⁵, Yeti Nurhayati⁶, Abdul Rahman⁷, Nesa Halimah Adzania⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Islam Nusantara, Indonesia

E-mail: rickyoseptry@uninus.ac.id

Abstract: This research is motivated by the government's efforts to provide quality education in Indonesia. One of the strategies implemented is establishing a Teacher Mobilization Center (BBGP) based on Minister of Education and Culture Regulation No. 14 of 2022. BBGP was formed with an important role in efforts to improve the quality of education. The main focus of BBGP West Java is to develop the professionalism of educators and education personnel and improve the quality of education in West Java. To ensure that the implementation of the BBGP program can run in accordance with regulations, a supervision program is carried out by the internal supervision unit (SPI). Supervision is important to maintain the quality of work in meeting organizational goals. This research aims to get an overview of the implementation of supervision at BBGP West Java in improving the quality of education. This research uses a qualitative approach with descriptive research methods. The general conclusion of this research is to get an overview of supervision management at BBGP West Java in improving the quality of education. Specific conclusions of this research: Supervision planning is carried out with SPI team coordination meetings and a work program. Organizing supervision, namely the assignment of the SPI team by the Head of the BBGP consisting of the Chair, secretary, and SPI members. The implementation of supervision at the West Java BBGP is run by the objectives, namely in the context of monitoring the implementation of the duties and functions of the West Java BBGP work unit. Program supervision is carried out by the SPI team, regarding the implementation of the West Java BBGP program.

Keywords: Supervision, SPI, BBGP

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia agar berkualitas. Salah satu strategi yang dilakukan yaitu dengan membentuk Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) berdasarkan Permendikbudristek No.14 Tahun 2022. BBGP dibentuk dengan peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Fokus utama BBGP Jawa Barat adalah mengembangkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan serta meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Barat. Untuk memastikan keterlaksanaan program BBGP dapat berjalan sesuai dengan regulasi, dilakukan program supervisi oleh satuan pengawasan internal (SPI). Supervisi merupakan hal penting guna menjaga kualitas kerja dalam memenuhi tujuan organisasi. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran implementasi supervisi di BBGP Jabar dalam meningkatkan mutu Pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Kesimpulan umum penelitian ini adalah mendapatkan gambaran tentang manajemen supervisi di BBGP Jabar dalam meningkatkan mutu pendidikan. Simpulan khusus penelitian ini: Perencanaan supervisi dilakukan dengan adanya rapat koordinasi tim SPI dan adanya program kerja. Pengorganisasian supervisi yaitu ditugaskannya tim SPI oleh Kepala BBGP yang terdiri dari Ketua, sekretaris dan anggota SPI. Pelaksanaan supervisi di BBGP Jabar berjalan sesuai dengan tujuan yaitu dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja BBGP Jabar. Pengawasan program dilakukan tim SPI, terhadap keterlaksanaan program BBGP Jabar.

Kata Kunci : Supervisi, SPI, BBGP

PENDAHULUAN

Mutu Pendidikan merupakan tolak ukur dalam mencapai keberhasilan sebuah bangsa. Pendidikan merupakan fondasi awal dalam kehidupan manusia yaitu melakukan pengembangan agar mampu menghadapi kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Peningkatan sistem pendidikan yang baik mempengaruhi keberhasilan negara dalam membangun sumber daya manusia yang memegang peran penting dalam kemajuan negara. Hal ini menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh negara Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Negara memberikan prioritas terhadap warga negara dalam mendapatkan haknya memperoleh pendidikan yang disebutkan dalam konstitusi Negara Indonesia pada pasal 31 ayat (10) yaitu “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Upaya dalam memberikan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak tentu memerlukan perangkat dan pihak pendukung. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan dapat terselenggara dengan dukungan dari semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan. Dijabar secara lanjut bahwa selain hak yang diterima juga terdapat kewajiban yang perlu diemban oleh beberapa pihak. Salah satu pihak yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan ini adalah pemerintah dan pemerintah daerah. Dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan per undang- undangan yang berlaku.

BBGP merupakan strategi dari pemerintah untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Disebutkan bahwa unit kerja ini adalah pelaksana teknis setingkat eselon II.b di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah dan pengawas. BBGP dibentuk dan terorganisir dalam sebuah peran dan fungsi yang ditetapkan dengan peran serta kelompok kerja didalamnya. Sesuai dengan kebijakan sebelumnya terkait hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, maka pembentukan BBGP telah ditentukan tugas dan fungsinya yang terkandung dalam Permendikbudriset No. 14 Tahun 2022. Sebagaimana yang dipaparkan dalam Pasal (2) yakni tugas dari BBGP adalah

melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan beserta dengan jabaran fungsi yang diantaranya adalah melaksanakan supervisi dalam proses pengembangan dan pemberdayaan tersebut.

Pelaksanaan supervisi merupakan upaya pengawasan dan pembinaan pada individu atau kelompok kerja. Supervisi dalam sebuah organisasi merupakan hal penting guna menjaga kualitas kerja dalam memenuhi tujuan organisasi tersebut. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi diatas tentu terdapat kumpulan individu yang menjabat peran tersebut. Pegawai BBGP merupakan sekelompok orang yang dipilih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Sebuah organisasi bernama Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) dibentuk dengan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh penjuru Provinsi Indonesia. Fokus utama BBGP adalah mengembangkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan serta meningkatkan mutu pendidikan di wilayah tersebut khususnya di provinsi Jawa Barat. Salah satu tugas dan fungsi BBGP adalah melaksanakan Supervisi Peningkatan kompetensi yaitu untuk meningkatkan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan serta untuk memastikan berjalannya fungsi pendidikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Arah capaian supervisi pendidikan adalah untuk mendorong mengembangkan kualitas pendidikan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pendidikan. Supervisi memberikan panduan atau pedoman terhadap kelompok kerja yang terlibat dalam pemangku peran dan fungsi BBGP. System kerja yang berkualitas tentu dapat menghasilkan proses yang tepat, efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan.

Secara umum penelitian ini akan berfokus pada pelaksanaan supervisi yang dilakukan BBGP Jawa Barat terhadap kelompok kerja dibawahnya sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian ini akan menelaah “Implementasi Supervisi di Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jawa Barat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”

Instrumental input dalam penelitian Implementasi Supervisi di Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jawa Barat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” adalah Permendikbudriset No. 14 Tahun 2022. Semua instrumental input mendukung raw input dalam Proses Supervisi dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan atau kontrol dalam proses Supervisi (Proses) yang dapat memberikan dampak kepada

Kemendikbudristek, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, (environmental input) sebagai outputnya adalah pelaksanaan Supervisi sehingga outcome-nya sebagai Ketercapaian Peningkatan Mutu Pendidikan.

Menurut Kompri (2014) manajemen pendidikan sebagai rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu terutama berupa lembaga pendidikan formal. Berdasarkan teori tersebut manajemen pendidikan merupakan keseluruhan proses kegiatan dalam pengelolaan dan pengendalian usaha kerja sama dengan memberdayakan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan Pendidikan yang efektif dan efisien. Dalam pengelolaan pendidikan agar efektif dan efisien tidak terlepas dari penerapan fungsi manajemen. Menurut Benty & Gunawan (2017) bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan yang berupa tindakan-tindakan yang mengacu kepada fungsi-fungsi manajemen yaitu: perencanaan (*planning*); pengorganisasian (*organizing*); pelaksanaan (*actuating*); dan pengawasan (*controlling*) yang sering disingkat POAC'. Dalam pelaksanaan supervisi, diperlukan pengelolaan yang baik sehingga diperlukan fungsi manajemen dalam pelaksanaan supervisi tersebut. Fungsi-fungsi manajemen menurut Turmudi (2021) bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan yang berupa tindakan-tindakan yang mengacu kepada fungsi-fungsi manajemen yaitu: perencanaan (*planning*); pengorganisasian (*organizing*); pelaksanaan (*actuating*); dan pengawasan (*controlling*) yang sering disingkat POAC.

Menurut Cholid et al. (2024) secara etimologis supervisi berasal dari bahasa inggris yaitu "to supervise" atau mengawasi. Sedangkan dalam KBBI supervisi adalah pengawasan utama, atau pengontrolan tertinggi. Menurut Soro et al. (2023) menyatakan bahwa "supervisi merupakan istilah yang dalam rumpun pengawasan tetapi sifatnya lebih manusiawi, dalam kegiatan supervisi pelaksanaan bukan mencari kesalahan tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan, agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat diketahui kekurangannya (bukan semata mata kesalahannya) untuk dapat diberitahu bagian yang perlu diperbaiki". Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Lubha et al. (2022) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan supervisi perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya teknik supervisi, prinsip supervisi, kegiatan rutin supervisor yang diperlukan dalam proses supervisi serta model supervisi yang

digunakan. Dari beberapa teori di atas dapat disebutkan bahwa supervisi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok yang mengandung unsur pembinaan untuk memperbaiki kekurangan.

Unit kerja pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam melayani masyarakat publik, mengimplementasikan kebijakan dan mengelola sumber daya dengan baik. Dalam menjalankan pelayanan tersebut perlu adanya Monitoring untuk memastikan setiap unit kerja menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan mendapatkan kualitas yang meningkat. Satuan pengawasan internal merupakan upaya yang serius sebagai satu organisasi yang menjalankan peran sebagai supervisor.

Satuan pengawasan internal lahir sebagai pengembangan upaya dalam manajemen risiko yang tercantum dalam Permendikbud No.66 Tahun 2015 mengenai Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebuah proses mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi dapat memengaruhi satuan kerja, mengelola risiko agar dalam batas toleransi risiko dan menyediakan penjaminan memadai terkait pencapaian tujuan satuan kerja. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 3 bahwa pemilik risiko atau instansi yang bersangkutan sebagai perlu menerapkan dan mengembangkan manajemen risiko di unit pemilik risiko masing-masing, menyusun laporan profil dan peta risiko, menyusun rencana alternatif untuk risiko level tinggi melaporkan secara berkala per semester paparan risiko di unitnya kepada menteri. Satuan pengawasan internal adalah satuan kerja internal yang berperan untuk melakukan pengawasan mandiri secara objektif kepada seluruh aspek operasional dan administratif. Berdasarkan Permendikbud No 22 Tahun 2017 Satuan pengawasan Intern dibentuk untuk membantu terlaksananya fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sebuah unit kerja di lingkungan kementerian. SPI berperan sebagai pengawas untuk meningkatkan efisiensi, mencegah penyimpangan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses dan sistem yang berlaku. SPI bertanggung jawab dalam mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi di dalam instansi pemerintah khususnya dilingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan memiliki tugas dan fungsi membantu Pimpinan Unit Kerja dalam melakukan pengawasan intern, dengan menyelenggarakan fungsi penyusunan program pengawasan, pengawasan kebijakan dan program,

pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal, pendampingan dan *review* rencana kerja dan anggaran serta *review* laporan keuangan, pemberian saran dan rekomendasi, penyusunan laporan hasil pengawasan dan pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan. Upaya tersebut ditujukan untuk menguatkan tata kelola dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian pendidikan dan kebudayaan agar mendapatkan pengawasan secara terprogram dan terstruktur agar lebih terkendali, efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan kebijakan. Berdasarkan Permendikbud No 22 Tahun 2017 Pasal 3 disebutkan “Satuan pengawasan Intern memiliki fungsi sebagai berikut : a) penyusunan program pengawasan; b) pengawasan kebijakan dan program; c) pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; d) pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan external; e) pendampingan dan review Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga, serta review laporan keuangan; f) pemberian saran dan rekomendasi; g) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan h. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan”. Berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan nomor: 3205/F.FQ/HK/2019 tentang pedoman teknis pengawasan bagi satuan pengawasan intern di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan terdapat tugas dan fungsi yang dipaparkan sebagai acuan pelaksanaan pengawasan. Dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan nomor: 3205/F.FQ/HK/2019 disebutkan bahwa “SPI dibentuk untuk membantu pemimpin unit kerja dalam melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan”. Pengawasan yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal (SPI) adalah untuk membantu pimpinan unit kerja dalam kegiatan pengawasan program kerja dan kegiatan yang dilakukan unit kerja. Selanjutnya dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan nomor: 3205/F.FQ/HK/2019 disebutkan bahwa program pengawasan ini dilakukan dalam rangka “penjaminan layanan dan peringatan dini”. Dalam melaksanakan tugasnya satuan pengawasan intern (SPI) menyelenggarakan fungsi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan nomor: 3205/F.FQ/HK/2019 yaitu: penyusunan program pengawasan, pengawasan kebijakan dan program, pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan

dan barang milik negara. Berdasarkan Permendikbud RI No 22 Tahun 2017 keanggotaan SPI terdiri atas Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota.

Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jawa Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. BBGP mengemban dan melaksanakan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. BBGP Jawa Barat berdiri sejak diterbitkan Permendikbudristek 14 Tahun 2022 dengan moto BBGP Jabar bergerak Bersama Juara (Jujur, Unggul Adaptif, Ramah, Amanah). BBGP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.

Mutu pendidikan terdiri dari kata mutu dan pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti mutu adalah “(ukuran) baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya)”. Secara istilah mutu merupakan sebuah proses terstruktur yang digunakan untuk memperbaiki keluaran atau output yang dihasilkan. Dari sini dapat kita pahami bahwa mutu merupakan upaya perbaikan lembaga atau institusi berdasarkan kecakapan atau kemampuan yang dimilikinya atau mutu adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat melebihi dari yang diharapkan. Menurut Mujammil mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar semaksimal mungkin. Selain itu, supervisi juga penting dalam mengelola dan memecahkan masalah yang muncul dalam lingkungan pendidikan. Melalui supervisi, kita dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, seperti kurangnya sumber daya, manajemen yang lemah, atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan prosedur (Rakhman et al., 2023). Dengan pemantauan yang baik, supervisor dapat memberikan solusi yang tepat dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Beberapa peneliti sebelumnya menjelaskan mengenai supervisi diantaranya adalah menurut Makhsun (2020) supervisi akademik dengan menggunakan pendekatan individual dapat meningkatkan kinerja guru dalam menyusun administrasi perencanaan pembelajaran. Menurut Saharudin et al. (2022) hasil dari penelitian menunjukkan

supervisi pendidikan memiliki fungsi sebagai koordinator, sebagai konsultan, sebagai pemimpin kelompok, sebagai evaluator. Menurut Pratiwi & Roesminingsih (2022) penelitian supervisi pedagogik memiliki fungsi sebagai koordinator, sebagai konsultan, sebagai pemimpin tim, sebagai evaluator. Menurut Rohmawati et al. (2023) Supervisi sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja mengajar guru. Ketika supervisi dilaksanakan dengan baik maka kinerja mengajar guru akan meningkat, tetapi sebaliknya jika supervisi tidak dilaksanakan dengan baik, maka kinerja mengajar guru juga akan menurun. Menurut Miranda et al. (2024) pendidikan sangat penting untuk meningkatkan mutu dan Kualitas Pendidikan. Proses pendidikan mulai rekrutmen siswa sampai dengan Hasil belajar dilakukan oleh seluruh komponen juga dipengaruhi dan tidak dapat terlepas peran kepala madrasah. Menurut Maryono (2011) Sebagai seorang supervisor harus memahami prinsip-prinsip atau azas supervisi pendidikan untuk dapat di gunakan sebagai landasan melaksanakan supervisi demi untuk mencapai kesuksesan. Addini et al. (2022) mendeskripsikan secara mendalam pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru dan Program Supervisi Akademik, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program supervisi akademik dan cara mengatasi kendala-kendala supervisi akademik. Mulloh & Muslim (2022) Kegiatan supervisi sangat membantu bagi guru dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi guru pada saat melakukan pembelajaran, serta dapat memberikan motivasi bagi guru agar selalu meningkatkan pengetahuan untuk menjadi guru yang professional. Menurut Hapizoh et al. (2020) supervisi sebagai suatu kegiatan pengawasan memiliki tujuan untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan pendidikan sekolah, sehingga perlu untuk dilihat bagaimana kinerja kepala sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan profesionalisme guru. Menurut Berliani et al. (2022) pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap tenaga kependidikannya khususnya guru, disebut supervisi klinis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran yang efektif. Hal ini sejalan dengan Muchlis (2022) pelaksanaan supervisi pendidikan yang diterapkan oleh kepala MIM PK Kartasura dilaksanakan dengan pendekatan langsung. Penilaian supervisi pendidikan disusun dalam bentuk rapor guru. Bentuk-bentuk supervisi pendidikan di MIM PK Kartasura ada tiga yakni penilaian *plan to lesson/RPP*, supervisi pengajaran, dan penilaian kedisiplinan. Hasil

dari peneliti sebelumnya bahwa supervisi sangat penting dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah atau situasi tertentu. Sebagaimana menurut Syahrizal & Jailani (2023) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Sedangkan menurut Ardiansyah et al. (2023) penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis. penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi supervisi di BBGP Jawa Barat dan meningkatkan mutu pendidikan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Menurut Sugiyono (2020) pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara yang mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi". Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan di BBGP Jawa Barat untuk memperoleh gambaran implementasi supervisi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada pihak-pihak yang menjadi narasumber terkait informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang nantinya diurai dan diolah kembali dalam penelitian diantaranya yaitu tim satuan pengawasan intern yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.. Studi dokumentasi dilakukan melalui dokumen tertulis terkait dengan data-data yang berkaitan dengan supervisi yang dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitiannya adalah peneliti sebagai instrument, catatan, pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Lokasi dalam penelitian ini adalah di BBGP Jawa Barat yang beralamat di Jl. Diponegoro No.12, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115. Yang menjadi sumber informasi dalam

penelitian ini diantaranya adalah ketua SPI, sekretaris dan anggota. Setelah data-data yang diperlukan telah terkumpul, selanjutnya dilakukan Teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya terdiri dari: *data reduction* (reduksi data), *data display* (Penyajian data), *Conclusion Drawing/Verification*. Dalam penelitian ini mereduksi data dilakukan dengan merangkum data-data yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran yang jelas, sehingga dapat membantu dalam menemukan inti temuan dan makna esensial, serta memfasilitasi analisis lebih mendalam. Dalam penelitian ini data *display* yang akan dilakukan disajikan dalam bentuk uraian singkat. Dalam tahap analisis data ini dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan kesimpulan yang dikemukakan tepat dan dapat mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai implementasi supervisi di BBGP Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang berlokasi di Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jawa Barat, melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi diperoleh hasil temuan penelitian yang merujuk pada fungsi manajemen (1) perencanaan (*planning*), (2) pengorganisasian (*organizing*), (3) pelaksanaan (*actuating*), dan (4) pengawasan (*controlling*).

Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) BBGP Jawa Barat. Kepala BBGP Jawa Barat dalam melaksanakan program pengawasan dilakukan melalui satuan pengawasan internal (SPI). SPI dibentuk untuk membantu Kepala BBGP dalam melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja di dalam lingkungan BBGP Jawa Barat. Dalam melaksanakan tugas, SPI menyelenggarakan fungsi penyusunan program pengawasan; pengawasan kebijakan dan program; pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal; pendampingan dan *review* Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga, serta revidi laporan keuangan; pemberian saran dan rekomendasi; penyusunan laporan hasil pengawasan; dan pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan. Dalam perencanaan program pengawasan ini, tim SPI melakukan rapat

kerja untuk menyusun program-program pengawasan internal, penyusunan jadwal program pengawasan internal, dan pembentukan tim yang terlibat di lapangan.

Pengorganisasian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) BBGP Jawa Barat. Pembentukan tim/kelompok kerja pengawasan dengan legalitas diterbitkannya SK dari Kepala BBGP Jawa Barat. Tim SPI merupakan kepanjangan tangan/yang membantu kepala BBGP dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan oleh tim SPI. Pembentukan tim SPI ditunjuk langsung oleh kepala BBGP Jawa Barat, sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimilikinya. Tim SPI terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota berdasarkan SK Pembentukan 2047/B&.2/Ws.00.00/2022 tentang Penetapan Tim SPI di Lingkungan BBGP Jawa Barat.

Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) BBGP Jawa Barat. Dalam Pelaksanaan pengawasan internal, di BBGP Jawa Barat didasari petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan. Dalam petunjuk teknis ini terdapat instrument pengawasan berupa lembaran form pengawasan untuk setiap unit kerja di BBGP Jawa Barat. Tim SPI melaksanakan pengawasan sesuai dengan program dan jadwal yang telah di rancang. Adapun komponen yang diawasi oleh SPI meliputi beberapa komponen yang diawasi diantaranya yaitu: kehadiran pegawai, kinerja pegawai, keterlaksanaan program, dan monitoring evaluasi dari program yang dilaksanakan. Sehingga diharapkan seluruh aktifitas yang dilaksanakan di BBGP Jawa Barat dapat berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Tim SPI ini melakukan pengawasan pada kinerja pegawai di BBGP Jawa Barat, dengan melakukan supervisi ke setiap unit kerja di BBGP Jawa Barat menggunakan instrument supervisi pegawai yang meliputi kehadiran pegawai yaitu melalui sistem kehadiran secara digital, dengan adanya sistem kehadiran secara digital tersebut, dapat memotivasi kualitas kehadiran pegawai. Selanjutnya tim SPI melakukan wawancara kepada pegawai untuk mengkonfirmasi keterlaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh pegawai. Dalam pelaksanaan supervisi tim SPI melakukan pendekatan yang baik dan komunikasi yang baik, sehingga unit kerja yang di supervisi dapat bekerja sama dengan baik. Tim SPI menanyakan beberapa pertanyaan dan dokumen berdasarkan *form* supervisi, dan pihak yang di supervisi pun memberikan keterangan dan memperlihatkan dokumen yang

diminta. Terdapat beberapa tantangan pada saat supervisi yaitu ada beberapa pegawai sebelum di supervisi merasa tegang, namun dengan komunikasi dan pendekatan yang baik hal tersebut tidak berlangsung lama dan Kembali menjadi kondusif. Pada saat supervisi juga ditemukan ada beberapa dokumen yang belum lengkap, namun supervisor memberikan kesempatan untuk melengkapinya dengan waktu yang disepakati bersama, dan pada waktu yang telah ditentukan tersebut dokumen yang diminta dapat dilengkapi. Tim SPI melakukan pengawasan juga terhadap keterlaksanaan program-program yang ada di BBGP Jawa Barat, salah satunya adalah program guru penggerak. Pada program guru penggerak dilakukan monitoring evaluasi untuk memastikan terlaksananya kegiatan tersebut berjalan sesuai petunjuk teknis. Kegiatan monitoring ini terdiri dari monitoring Pendampingan individu, dan Lokakarya PGP. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara random oleh BBGP Jawa Barat berdasarkan tingkat urgensi di lapangan, dikarenakan jumlah tim yang terbatas untuk melakukan monitoring. Yang menjadi urgensi monitoring tersebut adalah jumlah peserta PGP di setiap kabupaten di wilayah Jawa Barat dengan memiliki jumlah peserta PGP yang terbanyak. BBGP menerima laporan monitoring dari setiap Pengajar Praktik dan Calon Guru Penggerak melalui LMS (*Learning Management System*) dan berbentuk laporan fisik. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok kerja program guru penggerak, bahwa supervisi terhadap guru penggerak belum dilakukan karena program ini masih dalam proses pelaksanaan. Dengan adanya program supervisi yang dilakukan oleh tim SPI di BBGP Jawa Barat, pelaksanaan program-program BBGP terawasi dan terkendali sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku, sehingga program-program BBGP berjalan dengan baik diantaranya yaitu Program Guru Penggerak (PGP) yang telah terealisasi dari mulai Angkatan 1 sampai dengan angkatan 9 yang sudah selesai dan lulus menghasilkan guru-guru penggerak yang tersebar di Jawa Barat, hal tersebut sebagai strategi pemerintah melalui BBGP dalam meningkatkan kompetensi guru-guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran di satuan Pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan.

Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara kepada tim SPI. Tim SPI ini melakukan sistem pengawasan untuk memastikan keterlaksanaan seluruh program di BBGP agar sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Tim SPI melakukan kegiatan pengawasan ke

lapangan berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan SK dari kepala BBGP Prov. Jawa Barat. Tim SPI melakukan koordinasi dengan setiap unit kerja untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut pengembangan kompetensi pegawai seperti pelatihan, seminar, workshop dan lain-lain.

Pembahasan

Dari hasil temuan penelitian di lapangan peneliti melakukan pembahasan dikaitkan dengan beberapa teori perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Perencanaan

Dalam teori fungsi manajemen perencanaan merupakan tindakan awal dalam aktivitas manajerial pada setiap organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan supervisi di BBGP Jawa Barat yang dilakukan oleh Tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) BBGP Jawa Barat. Dalam perencanaan program supervisi, tim SPI melakukan rapat kerja dalam menyusun program pengawasan internal, penyusunan jadwal program pengawasan internal, dan pembentukan tim yang terlibat di lapangan. Perencanaan program yang telah disusun dijadikan dasar dalam pelaksanaan program supervisi di lapangan. Fungsi perencanaan dalam suatu kegiatan sangatlah penting, perencanaan membantu dalam penentuan tujuan suatu kegiatan, dengan perencanaan yang matang akan membantu dalam proses terlaksananya suatu kegiatan. Dalam perencanaan disusun tahapan-tahapan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal tersebut sesuai dengan teori fungsi manajemen mengenai perencanaan menurut Kompri (2014) “Perencanaan (*planning*) merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.”

Pengorganisasian

Dalam pengelolaan suatu kegiatan, fungsi manajemen pengorganisasian sangatlah penting untuk menjalankan kegiatan yang akan dilakukan. Dalam hal ini adalah pengorganisasian kegiatan supervisi yang dilakukan oleh tim Satuan pengawas Internal (SPI) BBGP Jawa Barat. Menurut Nasrudin & Maryadi (2019) Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, pengorganisasian kegiatan supervisi yang dilakukan di BBGP Jawa Barat

yaitu dengan ditugaskan langsung oleh Kepala BBGP Jawa Barat sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki dengan diterbitkannya SK No. 2047/B&.2/Ws.00.00/2022 tentang Penetapan Tim SPI di Lingkungan BBGP Jawa Barat, berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2017 Pasal 5 (1) dengan keanggotaan terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota; dan anggota. Setiap anggota melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan supervisi dan pengawasan di lingkungan BBGP Jawa Barat.

Pelaksanaan

Dalam pengelolaan suatu kegiatan, fungsi manajemen pelaksanaan didukung oleh upaya dari setiap anggota tim untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Pelaksanaan (*actuating*) merupakan upaya untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan agar dapat terwujud. Dalam pelaksanaan kegiatan peran dari anggota organisasi sangat penting, karena setiap anggota akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan pembagian tugas dan perannya masing-masing. Pada pelaksanaan supervisi dan pengawasan di BBGP Jawa Barat, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, setiap anggota tim SPI melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan fungsinya masing-masing. Yang menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah program supervisi yang telah disusun, jadwal/time schedule kegiatan, dan format-format supervisi. Tim SPI dalam melakukan supervisi terhadap beberapa komponen yang diawasi diantaranya yaitu: kehadiran pegawai, kinerja pegawai, keterlaksanaan program, dan monitoring evaluasi dari program yang dilaksanakan. Sehingga diharapkan seluruh aktifitas yang dilaksanakan di BBGP Jawa Barat dapat berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Tim SPI ini melakukan pengawasan pada kinerja pegawai di BBGP Jawa Barat, dengan melakukan supervisi ke setiap unit kerja di BBGP Jawa Barat menggunakan instrument supervisi pegawai yang meliputi kehadiran pegawai yaitu melalui sistem kehadiran secara digital, dengan adanya system kehadiran secara digital tersebut, dapat memotivasi kualitas kehadiran pegawai. Selanjutnya tim SPI melakukan wawancara kepada pegawai untuk mengkonfirmasi keterlaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh pegawai. SPI melakukan pengawasan juga terhadap keterlaksanaan program-program yang ada di BBGP Jawa Barat, salah satunya adalah program guru penggerak. Pada program guru penggerak dilakukan monitoring evaluasi untuk memastikan terlaksananya kegiatan

tersebut berjalan sesuai petunjuk teknis. Kegiatan monitoring ini terdiri dari monitoring Pendampingan individu, dan Lokakarya PGP. Dengan adanya program supervisi yang dilakukan oleh tim SPI di BBGP Jawa barat, pelaksanaan program-program BBGP terawasi dan terkendali sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku, sehingga program-program BBGP berjalan dengan baik diantaranya yaitu Program Guru Penggerak (PGP) yang telah terealisasi dari mulai Angkatan 1 sampai dengan angkatan 9 yang sudah selesai dan lulus menghasilkan guru- guru penggerak yang tersebar di jawa barat, hal tersebut sebagai strategi pemerintah melalui BBGP dalam meningkatkan kompetensi guru-guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran di satuan Pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan. Pelaksanaan supervisi oleh tim satuan pengawasan internal (SPI) berjalan sesuai dengan tujuan yaitu dalam rangka pelaksanaan tata kelola organisasi, pengendalian internal, implementasi manajemen risiko, ketaatan pada kriteria, penjaminan layanan, dan peringatan dini di BBGP Jawa Barat. Pelaksanaan supervisi yang dilakukan di BBGP Jawa Barat sesuai dengan teori fungsi manajemen menurut Wiliyanto (2020) *actuating* merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.'

Pengawasan

Pengawasan memang sangat penting dalam menjalankan suatu program. Dengan pengawasan yang baik, kita bisa memastikan bahwa semua tugas dan aktivitas berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga membantu dalam mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul, sehingga kita bisa segera menyelesaikannya dan mencegah penundaan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Menurut Benty & Gunawan (2017) pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Fungsi pengawasan sangat penting dalam suatu kegiatan sebagai kontrol terlaksananya suatu kegiatan, sehingga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hasil penelitian di BBGP Jawa Barat bahwa pelaksanaan program di BBGP Jawa Barat

seluruhnya dimonitoring oleh satuan pengawasan internal (SPI). Dalam melaksanakan tugas pengawasan, kepala BBGP Jawa Barat dibantu oleh tim Satuan pengawasan Internal (SPI). Tim SPI melakukan pengawasan di lingkungan BBGP Jawa Barat terhadap keterlaksanaan program BBGP Jawa Barat, pengawasan terhadap kepegawaian di BBGP Jawa Barat, pengawasan bidang keuangan, dan pengawasan terhadap barang milik negara. Tim SPI berkoordinasi dengan setiap unit kerja dan melaporkan hasil kegiatan pengawasan kepada kepala BBGP Jawa Barat. Dengan adanya koordinasi ini untuk memastikan keterlaksanaan program di BBGP Jawa Barat berjalan dengan efektif. Hal tersebut sesuai dengan teori fungsi manajemen, dimana pengawasan merupakan usaha dalam mengendalikan dan memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana dalam mencapai tujuan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan secara umum penelitian ini mampu memperoleh gambaran tentang manajemen Supervisi Peningkatan Kompetensi Guru Penggerak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jawa Barat. Adapun kesimpulan secara khusus, hasil penelitian ini merujuk pada fungsi manajemen sebagai berikut: (1) Perencanaan supervisi di BBGP Jawa Barat dilakukan dengan adanya rapat koordinasi dalam tim satuan pengawasan internal (SPI) sehingga menghasilkan program kerja SPI sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi di BBGP Jawa Barat. (2) Pengorganisasian kegiatan supervisi di BBGP Jawa Barat yaitu dengan ditugaskannya tim SPI oleh Kepala BBGP Jawa Barat dengan diterbitkannya SK dengan anggota tim yang terdiri dari Ketua, sekretaris dan anggota Satuan Pengawasan Internal. (3) Pelaksanaan supervisi di BBGP Jawa Barat berjalan sesuai dengan tujuan yaitu dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja BBGP Jawa Barat. (4) Pengawasan program di BBGP Jawa Barat dilakukan oleh tim satuan pengawasan internal (SPI), tim SPI melakukan pengawasan terhadap keterlaksanaan program-program yang ada di BBGP Jawa Barat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat peneliti berikan diantaranya yaitu bagi Kepala BBGP Jawa Barat dapat mengembangkan program supervisi BBGP Jawa Barat dalam Upaya meningkatkan mutu Pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi dapat bekerja sama dengan BBGP Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas pendidikan provinsi. Dinas Pendidikan

kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan BBGP Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas pendidikan provinsi. Peneliti lain diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih luas dan lebih mendalam

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini diantaranya adalah kepada Prof. Dr. Hanafiah, M.M.Pd. dan Dr. Ricky Yoseptry, M.M.Pd, selaku pembimbing dalam penelitian ini. Terkhusus kepada Kepala BBGP Jawa Barat dan Tim SPI yang telah mengizinkan dan membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Addini, A. F., Husna, A. F., Damayanti, B. A., & ... (2022). Konsep Dasar Supervisi Pendidikan. ... *Wahana Pendidikan*.
<https://jurnal.unigal.ac.id/jwp/article/view/7639>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Benty, D. D. N., & Gunawan, I. (2017). *Manajemen Pendidikan Suatu Pengantar Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Berliani, T., Wahyuni, R., Helencia, E. M., & ... (2022). Strategi Pengawas Sekolah Dasar dalam Melaksanakan Pengawasan Ke Sekolah Binaan. *Equity in Education*
<https://e-journal.upr.ac.id/index.php/eej/article/view/5055>
- Cholid, N., Hasibuan, I. M., Juwita, D. H. K., Astuti, W., Latif, A., & ... (2024). *Supervisi Pendidikan*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ZJKLEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=supervisi+kinerja+pendidik&ots=NE_sycrQ1_&sig=RWXnIDUkFZEB3oO_OwK5-GwZDZo
- Hapizoh, H., Harapan, E., & ... (2020). Pengaruh profesionalisme guru dan supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru. ... *Pendidikan*. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/JMKSP/article/view/3764>
- Kompri. (2014). *Manajemen Pendidikan 1*. Bandung: Alfabeta.
- Lubha, L., Syaifuddin, M., & Tambak, S. (2022). Supervisi Kepegawaian (Ketenagaan) Pendidikan. *Jurnal Ilmu Multidisplin*. <https://greenpub.org/JIM/article/view/44>
- Makhsun, M. S. I. H. N. (2020). *Supervisi akademik: Studi peningkatan kinerja guru MI dalam pengembangan bahan ajar*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=xsM3EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA80&dq=supervisi+kinerja+pendidik&ots=CvahvJLQA&sig=QPXDYPBUvnY4uCQzSIudcdTGpHI>
- Maryono. (2011). *Dasar-Dasar dan Teknik Menjadi Supervisor Pendidikan*. Jogjakarta:

Ar- Ruzz Media.

- Miranda, I., Hartono, H., & Nasution, A. H. (2024). Pengaruh Penggunaan Sarana Prasarana Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah Al Mawaddah *Jurnal Pendidikan Tambusai*. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/14087>
- Muchlis, M. (2022). Implementasi Supervisi Pendidikan dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Journal Of Administration and Educational* <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/ALIGNMENT/article/view/3776>
- Mulloh, T., & Muslim, A. Q. (2022). Analisis peran supervisi pendidikan dalam meningkatkan profesionalitas guru. *Journal Publicuho*. <http://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/29>
- Nasrudin, N., & Maryadi, M. (2019). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Pembelajaran di SD. *Manajemen Pendidikan*, 13(2), 15–23. <https://doi.org/10.23917/jmp.v13i2.6363>
- Pemerintah Indonesia. (2003). *Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- permendikbud. (2015). *Permendikbud No.66 Tahun 2015 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Permendikbud. (2017). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Permendikbudriset. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak*.
- Pratiwi, E. W., & Roesminingsih, E. (2022). Supervisi Akademik Untuk Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Dasar. *Ejournal.Unesa.Ac.Id*, 10(2). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/47508>
- Rakhman, F., Agusti, A., Surur, M., Wiranata, R., & Wahyudi, W. (2023). Analysis of Principals' Leadership Strategies in Improving Teacher Performance and Organizational Culture. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 7(1), 1128–1134. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v7i1.5737>
- Rohmawati, O., Poniya, P., & Adiyono, A. (2023). Implementasi Supervisi Pendidikan Sebagai Sarana Peningkatan Kinerja Guru Dalam Kegiatan Belajar Mengajar. *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*. <https://jpk.joln.org/index.php/2/article/view/16>
- Saharudin, S., Syaifuddin, M., & Tambak, S. (2022). Supervisi pendidikan. *Jurnal Ilmu Multidisplin*. <https://greenpub.org/JIM/article/view/57>
- Soro, S. H., Rhamdani, N., Defauzi, P., & Erawan, R. D. T. (2023). *Supervisi Pendidikan Implementasi Supervisi di Satuan-Satuan Pendidikan*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2fG_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA85&dq=analisis+implementasi+supervisi+oleh+kepala+sekolah+untuk+meningkatkan+pembelajaran+pada+satuan+pendidikan+jenjang+sekolah+dasar&ots=72-eI3Nqmr&sig=S90xYLV5wOk9Jq3uZHx5ALTuoyk

- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Turmudi, I. (2021). ... Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Pendidikan: Peranan Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Pendidikan. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*. <http://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Al-Riwayah/article/view/356>
- Wiliyanto, N. R. (2020). Manajemen Pendidikan Inklusidi SMAN 1 Padang. *MUDIR (Jurnal Manajemen Pendidikan)*, 4(1).